

Pengembangan Kurikulum PAI dengan Mengacu Pada Kerangka  
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Kebijakan Merdeka  
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi Islam

Masjudin

IAI Hamzanwadi Pancor

[masjudinfaras@gmail.com](mailto:masjudinfaras@gmail.com)

*Abstract*

*This article discusses the development of the Islamic Higher Education curriculum (PTKI), in particular, becomes a necessity while still paying attention to the specific aspects of PTKI with the synchronization of the Indonesian National Qualifications Framework Policy (KKNI) and Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) is government policy to enrich different learning experiences and practical skills. However, this new policy is subject to be interpreted and adapted into established existing curriculum. That way, PTKI graduates are expected to be able to meet the demands of the job market and the needs of other stakeholders and can take part in social life and international relations by showing character as Muslim professionals. The description of the discussion in this article consists of the notion of curriculum and its development, the essence of curriculum development, models and principles of curriculum development, national policies on higher education curriculum goals and steps for curriculum development and approaches in developing Islamic education curriculum. Curriculum development policy towards Indonesia's national qualification framework in the field of higher education is a qualification leveling framework that can juxtapose, equalize and integrate learning outcomes in formal education, informal education and or work experience into types and levels of higher education. The Indonesian National Qualifications Framework (KKNI) serves as a reference in compiling the learning outcomes of graduates from every level of education nationally. Conceptually, each qualification level in the IQF is composed of four main parameters, namely (a) work skills, (b) scope of knowledge/knowledge, (c) methods and level of ability in applying the knowledge/knowledge and (d) managerial abilities.*

**Keywords:** curriculum development, synchronization, Indonesian national qualification framework

**Abstrak**

Artikel ini membahas pengembangan kurikulum Perguruan Tinggi Islam (PTKI) khususnya menjadi suatu keniscayaan dengan tetap memperhatikan aspek kekhususan dari PTKI dengan sinkronisasi Kebijakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah kebijakan pemerintah untuk meragamkan pengalaman belajar dan skill praktis pembelajar. Akan tetapi, kebijakan ini

perlu untuk diterjemahkan dan diadaptasikan dengan kurikulum yang telah ada sebelumnya. Dengan begitu, lulusan PTIKI diharapkan dapat memenuhi tuntutan pasar kerja dan kebutuhan *stakeholders* lainnya dan dapat berkiprah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan pergaulan internasional dengan menunjukkan karakter sebagai profesional muslim. Deskripsi pembahasan dalam artikel ini terdiri dari pengertian kurikulum dan pengembangannya, hakekat pengembangan kurikulum, model dan prinsip pengembangan kurikulum, kebijakan nasional tentang kurikulum perguruan tinggi tujuan dan langkah-langkah pengembangan kurikulum dan Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum pendidikan Agama Islam. Kebijakan pengembangan kurikulum terhadap kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berfungsi untuk menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional. Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial.

**Kata Kunci;** *pengembangan kurikulum, sinkronisasi, kerangka kualifikasi nasional Indonesia*

## **Pendahuluan**

Pendidikan sebagai pilar utama kehidupan terus diupayakan untuk adaptif terhadap perkembangan zaman (Muhammedi, 2016). Era disrupsi dan hadirnya pandemi memaksa pendidikan melakukan perubahan dan pengembangan dalam prosesnya. Pendidikan yang berada dalam status quo berpotensi akan memenjarakan nalar dan potensi peserta didiknya. Oleh karenanya, proses dalam pendidikan senantiasa terbuka untuk perubahan. Melalui penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menguatkan otonomi dan fleksibilitas proses pembelajaran di perguruan tinggi (Deni Sopiansyah dkk, 2022).

Fleksibilitas dalam penyelenggaraan pendidikan dapat diakomodir di dalam kurikulum pendidikannya. Karena kurikulum menjadi bagian penting dalam mendesain aktivitas pendidikan secara makro dan pembelajaran secara mikro. Pembelajaran yang akomodatif adalah

pembelajaran yang mampu mendekatkan peserta didik untuk adaptasi dengan perkembangan wacana dan isu-isu kontemporer, kebijakan, dan masa. Penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi dipandang penting untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang menyiapkan peserta didiknya mampu adaptif terhadap traformasi budaya, sosial, perkembangan di dunia kerja, pergerakan teknologi informasi yang pesat, dan persaingan yang ketat. Kemampuan dan kapabilitas mahasiswa sebagai calon lulusan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan perubahan dan perkembangan zaman. Relevansi kemampuan dibangun berdasarkan kebutuhan dengan dunia industri dan potensi- potensi perubahan yang semakin tidak menentu. Oleh karenanya, perguruan tinggi dituntut untuk responsif dalam merancang dan mengimplementasikan proses pendidikan yang kreatif, inovatif, dan progresif serta berorientasi pada pemenuhan capaian pembelajaran yang komprehensif dan senantiasa relevan (Buku Panduan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, 2020).

Di Tahun 2020, kebijakan fundamental terkait pengelolaan perguruan tinggi lahir melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Salah satu ruh yang tertuang dalam kabijakan tersebut adalah digulirkannya tatanan baru yang dikenal dengan istilah MBKM. Keberadaan Permendikbud tersebut menjadi tambahan landasan bagi Perguruan Tinggi Islam untuk meninjau, menyesuaikan, dan mengembangkan kurikulumnya.

Kurikulum berasal dari Bahasa Latin "*Curriculum*", semula berarti "*a running course, specially a chariot race course*" dan terdapai pula dalam bahasa Prancis "*Courir*" artinya "*to run*" artinya "*berlari*." Istilah ini digunakan untuk sejumlah "*courses*" atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai gelar atau ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah (Nasution, 1993: 9).

Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata-kata

"*Manhaj*" (*kurikulum*) yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka (Al- Syaibani, 1979: 478).

Sedangkan menurut Zakiah Daradjat *Kurikulum* (dalam Ramayulis, 1998) dapat dipandang sebagai "suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan pendidikan tertentu". Batasan ini mencerminkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, pendidikan itu adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan. *Kedua*, di dalam kegiatan pendidikan itu terdapat suatu rencana yang disusun atau diatur. *Ketiga*, rencana tersebut dilaksanakan di sekolah melalui cara-cara yang telah ditetapkan (Daradjat, 2006: 122).

Jenis penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative research*). Karena jenis penelitian ini adalah kualitatif maka hasil dari penelitian ini berupa data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Bogdan & Biklen (1998: 5) serta Lincoln & Guba (1985: 5). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis (Creswell, 1998: 51).

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen kunci (*researcher as key instrument*) (Creswell, 2014: 186) yaitu sebagai perencana, peninjau, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitiannya (Moleong, 2008: 168). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi transedental empiris dari Moustakas. Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah sebagaimana konsep dari Husserl yakni *ephoce* (pengurangan). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, *Pertama*, analisis data dalam situs (*within-site analysis*) (Bogdan & Biklen, 1998: 145). *Kedua*, analisis data lintas situs (*cross-site analysis*) (Miles et al., 2014: 100). Untuk menguji keabsahan data, peneliti mengikuti teori Lincoln dan Guba yakni keabsahan data dapat kualitatif dapat dijamin dengan menggunakan empat kriteria yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*),

kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

## Temuan Penelitian

### 1. Hakekat Pengembangan Kurikulum

Kurikulum merupakan alat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu pendidikan. Tanpa kurikulum yang sesuai bagi dan tepat akan sulit untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan yang diinginkan. Dengan kurikulum yang sesuai dan tepat diharapkan sasaran dan tujuan pendidikan akan dapat tercapai secara maksimal. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003* menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Kurikulum juga sering dibedakan antara kurikulum sebagai rencana (*curriculum plan*) dengan kurikulum yang fungsional (*functioning curriculum*). Menurut George. A (1968: 6) “A curriculum is a written document which may contain many ingredients, but basically it is a plan for education of pupils during their enrollment in given school”. Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. Romine sebagaimana dikutip oleh Hamalik, mengatakan bahwa *Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities and experiences which pupils have under direction of the school whether in the class room or not* (Hamalik, 1999: 18).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan, bahwa kurikulum merupakan sejumlah mata pelajaran atau kegiatan yang mencakup program pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Lazimnya kurikulum di pandang sebagai suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya.

Kurikulum harus memiliki kesesuaian. Pertama ialah kurikulum harus

sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Kesesuaian yang kedua ialah kurikulum harus sesuai dengan komponen-komponen kurikulum, yakni isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga dengan evaluasi yang harus sesuai dengan proses, isi dan tujuan kurikulum.

Para pakar memiliki perbedaan pendapat mengenai jumlah komponen kurikulum, meski sebenarnya memiliki kesamaan jika dipahami lebih jauh. Abdullah Idi menjelaskan mengenai 5 komponen kurikulum dalam bukunya yang berjudul *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*, yakni: (1) komponen tujuan, (2) komponen isi dan struktur program atau materi, (3) komponen media atau sarana dan prasarana, (4) komponen strategi belajar mengajar, (5) komponen proses belajar mengajar, dan (6) komponen evaluasi atau penilaian (Idi, 2010: 52). Sedangkan Dimiyati dan Mudjiono mengatakan bahwa komponen kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu: tujuan, materi/pengalaman belajar, organisasi, dan evaluasi (Dimiyati & Mudjiono, 2002: 273). Sementara itu, Sukmadinata menyebutkan 4 komponen utama dalam kurikulum yang terdiri dari: tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian dan media, serta evaluasi. Lebih dari itu, Hamdani Hamid menyebutkan empat komponen kurikulum, yakni: (1) komponen tujuan, (2) komponen isi atau materi pelajaran, (3) komponen metode atau strategi, dan (4) komponen evaluasi (Sukmadinata, 2013: 103).

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum sekolah, kemudian diaplikasikannya ke dalam kelas sebagai wujud proses belajar mengajar disertai dengan penilaian/penilaian terhadap kegiatan tersebut, sebagai langkah penyempurnaan sehingga memperoleh hasil yang lebih baik dan bagus. Pengembangan kurikulum suatu proses siklus, yang tidak pernah ada starting dan tidak pernah berakhir. Hal ini disebabkan pengembangan kurikulum itu merupakan suatu proses yang tertumpu pada unsur-unsur dalam kurikulum, yang di dalamnya meliputi tujuan, isi (materi), metode, organisasi dan penilaian itu sendiri (Ahmad, 1998: 64).

Kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta masyarakat yang sedang membangun. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang berlaku. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, prinsip kepraktisan, dan prinsip efektifitas (Sukmadinata, 2013: 153).

Selain mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, dalam praktik pengembangan kurikulum juga perlu memperhatikan beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum. Terdapat empat pendekatan dalam pengembangan kurikulum, yaitu (1) pengembangan kurikulum dengan pendekatan akademis, dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran atau mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk (persiapan) pengembangan disiplin ilmu; (2) pendekatan humanistik, dalam pendekatan humanistik kurikulum dipusatkan pada siswa (*student centered*) dan mengutamakan perkembangan afektif siswa sebagai prasyarat dan sebagai bagian integral dari proses belajar; (3) pendekatan rekonstruksi sosial, sangat memperhatikan hubungan kurikulum dengan sosial masyarakat dan politik perkembangan ekonomi, dan (4) pendekatan teknologis, konsep kurikulum teknologis dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan lunak dalam pendidikan. Prosedur pembelajaran didasarkan pada psikologi behaviorisme dan teori stimulus-respon (Muhaimin, 2014: 140).

Selain berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, terdapat juga model-model yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata, pemilihan model-model pengembangan kurikulum tersebut bukan hanya didasarkan pada kelebihan-kelebihan yang dimiliki setiap model, namun juga perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan dan sistem pengelolaan yang dianut, serta model konsep pendidikan yang digunakan. Model pengembangan kurikulum yang sistem pendidikan dan

pengelolaannya bersifat sentralisasi tentu berbeda dengan model pengembangan kurikulum desentralisasi.

Sedangkan menurut Dimiyati & Mudjiono (2002: 280) mengemukakan bahwa model-model pengembangan kurikulum sering kali diistilahkan dengan nama penggagasnya. Dalam hal ini, model-model pengembangan kurikulum yang akan dideskripsikan meliputi model pengembangan kurikulum Ralph Tyler, Hilda Taba, D.K. Wheeler, Beauchamp, dan Rogers.

Mekanisme pengembangan kurikulum harus melalui beberapa tahapan, beberapa tahapan itu antara lain sebagai berikut: (1) Studi kelayakan dan kebutuhan, (2) Penyusunan konsep awal perencanaan kurikulum, (3) Pengembangan rencana untuk melaksanakan kurikulum, (4) Pelaksanaan uji coba kurikulum di lapangan, (5) Pelaksanaan kurikulum, (6) Pelaksanaan penilaian dan pemantauan kurikulum, dan (7) Pelaksanaan perbaikan dan penyesuaian (Hamalik, 1999: 142).

## 2. Model dan Prinsip Pengembangan Kurikulum.

Dalam pengembangan model kurikulum, sedapat mungkin didasarkan pada faktor-faktor yang konstan sehingga ulasan mengenai model-model yang dibahas dapat dilakukan secara konsisten. Faktor-faktor konstan yang dimaksudkan adalah dalam pengembangan model kurikulum perlu didasarkan pada tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi yang tergambar dalam proses pengembangan tersebut. Model-model pengembangan kurikulum tersebut seperti model Ralph Tylor, Hilda Taba, D.K. Wheeler, Audrey dan Howard Nicholls, Deckler Walker, Malcom Skillbeck, kurikulum terpadu (*Integrated curriculum*) (Idi, 2010: 177).

Sedangkan prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum adalah 1) relevansi, 2) efektifitas, 3) efisiensi, 4) kesinambungan, 5) fleksibilitas, 6) berorientasi tujuan, 7) prinsip dan model pengembangan kurikulum (Idi, 2010: 201- 205).

Sedangkan pengembangan kurikulum pada tingkat dan jenis pendidikan apapun, menurut Nasution yang dikutip Prabawa & Ariatmi harus didasarkan pada empat asas, yaitu 1) asas filosofis, yang pada

hakikatnya menentukan tujuan umum pendidikan, 2) asas sosiologis, yang memberikan dasar untuk menentukan apa yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 3) asas organisatoris, yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana bahan-bahan itu disusun, seberapa luas dan urutannya, dan 4) asas psikologis, yang memberikan prinsip perkembangan kejiwaan siswa dalam berbagai aspek dan metode belajar agar bahan yang disediakan dapat dicerna siswa sesuai dengan taraf perkembangannya (Prabawa & Ariatmi, 2002: 124).

### 3. Kebijakan Nasional tentang Kurikulum Perguruan Tinggi

Terbitnya Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional dan UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Pasal 29 ayat (1), (2), dan (3) telah berdampak pada kurikulum dan pengelolaannya di setiap program. Kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi, mengharuskan Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas selambat-lambatnya tahun 2017 menerapkan kurikulum mengacu KKNI. Jika masih ada Pendidikan Tinggi yang belum melaksanakan amanah sebagaimana yang tertuang dalam KKNI dan SNPT bisa tidak memperoleh pengakuan alumninya.

Selanjutnya juga Kebijakan MBKM merupakan gagasan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan nasional. Konsep MBKM merupakan upaya mewujudkan kemandirian dalam berpikir (Aini Qolbiyah, 2022). Semangat merdeka belajar diorientasikan untuk melatih peserta didik agar mengembangkan kemampuan beripikir kritis, kreativitas, kolaboratif, dan memiliki kemampuan berkomunikasi efektif (Gina Nurvina Darise, 2021). Program-program MBKM juga dianggap sebagai upaya untuk mengembangkan

generasi yang memiliki kemampuan softskill dan hardskill, serta mumpuni dalam aspek leadership dan kepribadian (Aby Maulana, 2022) (Dindin Alawi, 2022). Terlebih dalam era disrupsi, MBKM adalah bagian dari upaya pembaharuan di era digitalisasi dalam bidang pendidikan yang membuka batas ruang kelas (fisik) menjadi ruang digital (Rodiyah, 2021).

KKNI dan MBKM bidang pendidikan tinggi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan capaian pembelajaran di jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) berfungsi untuk menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan dari setiap jenjang pendidikan secara nasional.

Dengan menggunakan prinsip pengembangan berkelanjutan, diharapkan kurikulum tidak bersifat absolut dan beku, namun dinamis dan mampu merespon perkembangan era. Begitu juga dengan semangat proses peninjauannya, diharapkan tidak hanya sekedar menjadi konsumen perubahan, namun responsif terhadap perubahan. Penyesuaian kurikulum Perguruan Tinggi Islam dilakukan dengan pendekatan integratif. Di satu sisi mengacu pada kebijakan MBKM, di sisi lain tetap berpedoman pada prinsip dan nilai yang dikembangkan.

Terobosan implementasi kebijakan MBKM yang diinisiasi dan dimassifkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jalan untuk mengembangkan kompetensi sarjana yang tangguh, adaptif dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi calon pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka adalah mahasiswa memiliki hak belajar di Luar Program Studi selama tiga semester atau setara dengan 60 SKS (Buku Panduan Kampus Merdeka – Merdeka Belajar, 2020). Peserta didik pada level pendidikan tinggi mempunyai kesempatan untuk memperluas pengalaman pembelajaran di luar kelas dalam waktu yang relatif lama. Proses pengembangan cara belajar dan perluasan sumber belajar merupakan substansi dari MBKM (Moh. Mizan Habibi, 2021). Kebijakan tersebut

memberikan peluang bagi peserta didik untuk menemukan beragam pengalaman belajar dengan banyak pihak, baik di internal kampus maupun pihak mitra perguruan tinggi di luar kampus.

Secara konseptual, setiap jenjang kualifikasi dalam KKNI dan MBKM disusun oleh empat parameter utama yaitu (a) keterampilan kerja, (b) cakupan keilmuan/pengetahuan, (c) metoda dan tingkat kemampuan dalam mengaplikasikan keilmuan/pengetahuan tersebut serta (d) kemampuan manajerial. Keempat parameter yang terkandung dalam masing-masing jenjang disusun dalam bentuk deskripsi yang disebut Deskriptor KKNI.

Selain KKNI, terdapat SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) yang juga merupakan kebijakan dalam perumusan kurikulum perguruan tinggi sebagaimana yang terdapat dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT pada bagian standar kompetensi lulusan, pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

#### **4. Tujuan dan Langkah-langkah Pengembangan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional.**

Salah satu aspek yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kurikulum KKNI adalah memperhatikan maksud dan tujuan pelaksanaannya. Maksud dan tujuan pengembangan KKNI adalah sebagai perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia dalam sistem pendidikan dan pelatihan serta sistem pengakuan kompetensi kerja secara nasional, dimana KKNI dimaksudkan menjadi pedoman untuk:

- 1) Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- 2) Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- 3) Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang

diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dengan kebutuhan keilmuan, keahlian dan keterampilan di tempat kerja;

- 4) Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia serta menjamin pengakuan yang setara bagi sumber daya manusia Indonesia yang akan bekerja di negara lain.

Tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNi Dan SN-Dikti (2018: 3-5):

- 1) Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional; Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional;
- 2) Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 3) Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara Negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
- 4) Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- 5) Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja;
- 6) Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal,

pelatihan atau pengalaman kerja;

- 7) Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman;
- 8) Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan;
- 9) Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional;
- 10) Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang;
- 11) Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sector sumberdaya manusia;
- 12) Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*);
- 13) Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional;
- 14) Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia;
- 15) Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

Sedangkan langkah-langkah dalam menyusun kurikulum pendidikan tinggi khususnya kurikulum KKNi yaitu: 1) analisis SWOT lembaga sebagai *scientific vision*, 2) analisis kebutuhan (*tracer study*), 3) penetapan profil

lulusan, dan 4) rumusan capaian pembelajaran (Sutrisno & Suyadi, 2016: 74-81).

## 5. Tinjauan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk terwujudnya insan kamil yang memiliki integritas iman, moral, dan amal, adanya kesatuan antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan Agama Islam harus menyentuh tiga ranah, yaitu hati (*heart*) atau afektif, akal (*head*) atau kognitif, jasmaniyah (*hand*) atau psikomotorik. Ketiganya harus berjalan secara simultan, integratif dan holistik (Fitri, 2013).

Dengan demikian, kurikulum yang dipandang baik untuk mencapai tujuan PAI adalah yang bersifat *integrated* dan komprehensif, mencakup ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan duniawi dan ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan ukhrawi kelak. Kurikulum yang holistik yang dapat mengembangkan kepribadian mahasiswa secara utuh (*kaffah*). Maka, pendidikan harus memberikan pelayanan kepada pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, seperti aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah, linguistik, ruhiyah dan lain sebagainya.

Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan agama Islam adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan di amalkan harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama.

1. Mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi mahasiswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual.
2. Adanya keseimbangan antara kandungan kurikulum dan pengalaman serta kegiatan pengajaran (Mujib & Mudzakkir, 2006: 10).

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sebagai inti dari ciri-ciri kurikulum pendidikan Agama Islam adalah kurikulum yang dapat memotivasi mahasiswa untuk berakhlak atau berbudi pekerti luhur, baik terhadap Tuhan, terhadap diri dan lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, maka komposisi kurikulum PAI harus sudah mulai mempertimbangkan kembali pentingnya penguatan materi-materi utama,

yaitu penguasaan terhadap sub-mata pelajaran yang meliputi; Al-Qur'an Hadits, Aqidah- Akhlak, Fiqh dan SKI. Sementara materi perkuliahan yang menguatkan kompetensi metodologis dan profesionalisme harus disesuaikan setelah matakuliah inti terakomodasi kepentingannya terlebih dahulu. Jika saat ini persentasenya hanya sekitar 20-30% untuk matakuliah ke-PAI-an, maka kedepan perlu dikembangkan menjadi 40-60%, sehingga SKL nya dapat dipenuhi (Fitri, 2013).

Desain dan pengembangan kurikulum PAI perlu memperhatikan komposisi dari struktur kurikulum yang ada. Tidak hanya mengembangkan kompetensi matakuliah pengantar, keahlian, profesi, metodologi dan pendukung semata, tetapi juga memperhatikan mata kuliah inti ke-PAI-an. Penentuan kurikulum inti tersebut didasarkan atas setidaknya empat hal, yaitu: (1) Visi dan misi PTAIN, (2) SKL yang ditetapkan, menyangkut tujuan dari program pembelajaran yang dilaksanakan; (3) Karakteristik peserta didik menyangkut kemampuan awal yang dimiliki; dan (4) harapan dari stakeholder (Muhaimin, 2009: 149).

#### **6. Pendekatan-pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam.**

Beberapa hal yang dilakukan dalam peninjauan, penyesuaian, dan pengembangan kurikulum ini adalah 1) Sinkronisasi CPL (SNPT dan Universitas), 2) Penyesuaian antara CPL, visi-misi, profil lulusan, dan mata kuliah, 3) Perumusan Body of Knowledge (BoK) dan bahan kajian, 4) Perumusan instrumen pengukuran CPL, 5) Pencermatan dan pengembangan nomenklatur mata kuliah, 6) Evaluasi sekuensi dan sebaran mata kuliah, 7) Pengembangan pilihan jalur kelulusan, 8) Pengembangan proses delivery (pendekatan, model, strategi, dan metode pembelajaran), dan 9) Pengembangan teknik asesmen pembelajaran.

Pengembangan kurikulum pada prodi PAI juga didasarkan pada hasil analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1. Peta Analisis SWOT

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi</li> <li>• Memiliki desain kurikulum yang dapat mencapai kompetensi lulusan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desain kurikulum PAI didominasi oleh kompetensi pedagogik.</li> <li>• Pembelajaran masih cenderung menggunakan pendekatan monodisipliner ke-PAI-an</li> </ul>
PELUANG (O)	Strategi S – O	Strategi W – O
Adanya ketertarikan masyarakat dalam keilmuan PAI	Optimalisasi desain kurikulum berbasis outcome sebagai bagian dari implementasi OBE	Melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum, dan monev proses pembelajaran secara berkala
ANCAMAN (T)	Strategi S – T	Strategi W – T
Banyak Program studi serumpun dari Perguruan Tinggi lain memiliki kurikulum yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan kurikulum berbasis <i>local genius</i></li> <li>• Mengembangkan kurikulum berlandaskan kriteria lembaga sertifikasi internasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memodifikasi dominasi kajian pedagogik ke penguatan keilmuan PAI dalam mendesain kurikulum</li> <li>• Mengembangkan pembelajaran berbasis pendekatan multidisipliner dan <i>direct learning</i></li> </ul>

Berdasarkan hasil SWOT di atas, pengembangan kurikulum diarahkan dengan lebih banyak memberikan ruang bagi proses pembelajaran untuk memperluas sumber dan media pembelajaran. Sehingga mahasiswa semakin mempunyai ruang untuk mengembangkan diri dan kreativitasnya.

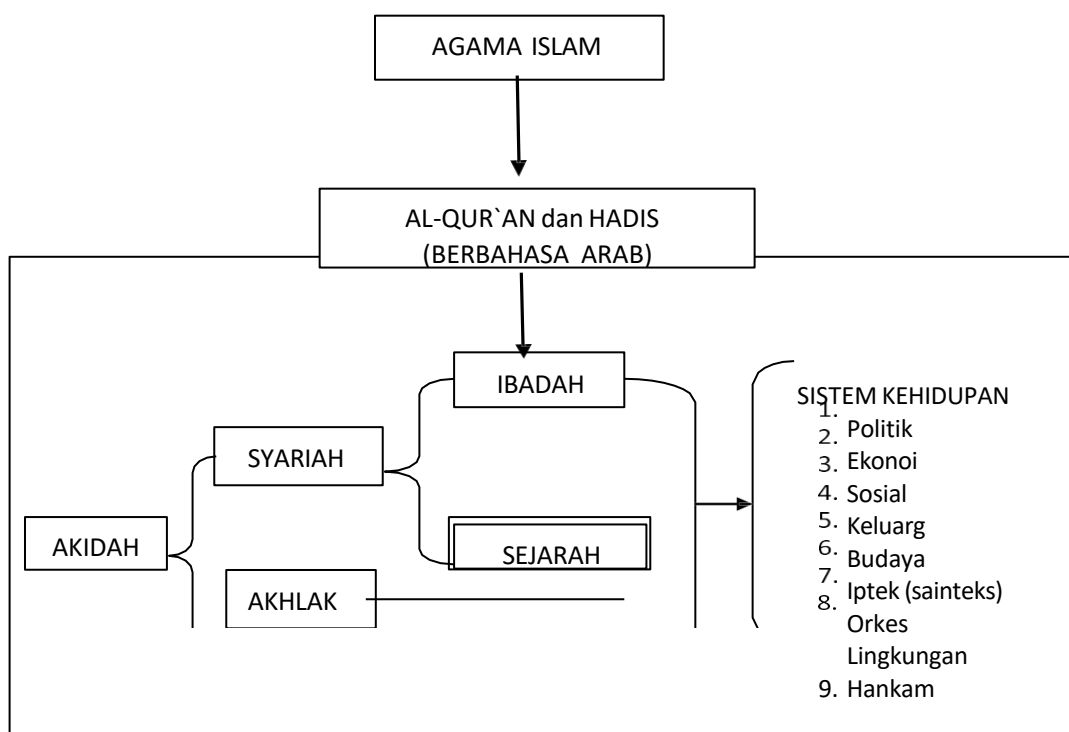
Menurut Muhadjir dalam Muhaimin, di dalam teori kurikulum setidaknya terdapat empat pendekatan yang dapat digunakan dalam pengembangan kurikulum, yaitu: 1) pendekatan subjek akademis; 2) pendekatan humanistik; 3) pendekatan teknologis; dan 4) pendekatan

rekonstruksi sosial. Dengan memperhatikan karakteristik materi Pendidikan Agama Islam, maka pengembangan kurikulum tersebut dapat menggunakan pendekatan eklektik, yakni dapat memilih yang terbaik dari keempat pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristiknya.

**1. Pendekatan Subjek Akademis.**

Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan didasarkan pada sistematisasi disiplin ilmu masing-masing. Setiap ilmu pengetahuan memiliki sistematisasi tertentu yang berbeda dengan sistematisasi ilmu lainnya. Pengembangan kurikulum subjek akademis dilakukan dengan cara menetapkan lebih dahulu mata pelajaran/mata kuliah apa yang harus dipelajari peserta didik, yang diperlukan untuk (persiapan) pengembangan disiplin ilmu.

Pendidikan agama Islam di sekolah meliputi aspek Al-Qur`an/Hadis, keimanan, akhlak, ibadah/muamalah, dan tarikh/sejarah umat Islam. Di madrasah, aspek-aspek tersebut dijadikan sebagai sub-sub mata pelajaran PAI yang meliputi: mata pelajaran Al-Qur`an-Hadis, Fiqih, Akidah-Akhlak, dan Sejarah (Kebudayaan) Islam. Hubungan antara satu aspek/mata pelajaran dengan aspek/mata pelajaran lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Pada gambar tersebut, dapat dijelaskan kedudukan dan kaitan yang erat antara beberapa aspek/mata pelajaran PAI, yaitu: Alquran-Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti merupakan sumber akidah (keimanan), syari'ah (ibadah, muamalah) dan akhlak, sehingga kajiannya berada di setiap unsur tersebut. Akidah (ushuluddin) atau keimanan merupakan akar atau pokok agama. Syari'ah (ibadah, muamalah) dan akhlak bertitik tolak dari akidah, dalam arti sebagai manifestasi dan konsekuensi dari akidah (keimanan dan keyakinan hidup). Syari'ah merupakan sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya. Dalam hubungannya dengan Allah diatur dalam ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, zakat, puasa, dan haji), dan dalam hubungannya dengan sesama manusia dan lainnya diatur dalam muamalah dalam arti luas.

Akhlak merupakan aspek sikap hidup atau kepribadian hidup manusia, dalam arti bagaimana sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah dalam arti khas) dan hubungan manusia dengan manusia dan lainnya (muamalah) itu

menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan sistem kehidupannya (politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, kebudayaan/seni iptek, olahraga/kesejahteraan, dan lain-lain) yang dilandasi akidah yang kokoh. Sedangkan tarikh (sejarah-kebudayaan Islam merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia Muslim dari masa ke masa dalam usaha bersyariah (beribadah dan bermuamalah) dan berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah. Pendekatan subjek akademis dalam menyusun kurikulum PAI dilakukan dengan berdasarkan sistematisasi disiplin ilmu, Misalnya, untuk aspek keimanan atau mata pelajaran akidah menggunakan sistematisasi ilmu tauhid, aspek/mata pelajaran Alquran menggunakan sistematisasi ilmu Alquran atau ilmu tafsir, akhlak menggunakan sistematisasi ilmu akhlak, ibadah/ syariah/muamalah menggunakan sistematisasi ilmu fiqih, dan tarikh/sejarah menggunakan sistematisasi ilmu sejarah (kebudayaan) Islam. Masing-masing aspek/mata pelajaran tersebutmemilikikarakteristik tersendiri, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan disiplinilmu lebih lanjut bagi para peserta didik yang memiliki minat di bidangnya. Namun demikian, dalam pembinaannya harus memperhatikan kaitan antara aspek/mata pelajaran yang satu dengan lainnya (Muhaimin, 2012: 140-142).

## 2. Pendekatan Humanistik

Pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum bertolak dari ide "*memanusiakan manusia*". Penciptaan konteks yang akan memberi peluang manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat manusia merupakan dasar filosofi, dasar teori, dasar evaluasi dan dasar pengembangan program pendidikan.

"*Memanusiakan Manusia*" berarti usaha memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan alat-alat potensialnya seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana bagi

pemecahan masalah-masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya manusia, dan pengembangan sikap iman dan takwa kepada Allah Swt (Hanafi et al., 2018: 79).

Dari uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa istilah "*memanusiakan manusia*" dalam perspektif pendidikan Islam berarti: (1) usaha memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan alat-alat potensial dan berbagai potensi dasar atau fitrahnya seoptimal mungkin untuk dapat difungsikan sebagai sarana bagi pemecahan masalah masalah hidup dan kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya manusia, dan pengembangan sikap iman dan takwa kepada Allah Swt.; (2) menumbuh-kembangkan sebagian sifat-sifat ketuhanan (potensi/fitrah) itu secara terpadu dan diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosialnya; (3) membimbing dan mengarahkan manusia agar mampu mengemban amanah dari Allah, yaitu menjalankan tugas-tugas hidupnya di muka bumi, baik sebagai '*abdullah* (hamba Allah yang harus" tunduk dan taat terhadap segala aturan dan Kehendak-Nya serta mengabdikan hanya kepada-Nya maupun sebagai khalifah Allah di muka bumi, yang menyangkut pelaksanaan tugas kekhalifahan, baik terhadap diri sendiri, dalam keluarga/rumah tangga, masyarakat, maupun tugas kekhalifahan terhadap alam.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kurikulum PAI dikembangkan dengan bertolak pada kebutuhan dan minat peserta didik, yang mendorong mereka untuk dapat menumbuhkembangkan alat-alat potensial dan potensi-potensi dasar dan/atau fitrahnya, serta mendorongnya untuk mampu mengemban amanah baik sebagai *abdullah* maupun *khalifah*-Nya. Materi ajar dipilih sesuai dengan minat dan kebutuhannya, peserta didik menjadi subjek pendidikan, dalam arti ia menduduki tempat utama dalam pendidikan. Guru/dosen berfungsi sebagai psikolog yang memahami

segala kebutuhan dan masalah peserta didik, ia berperan sebagai bidan yang membantu peserta didik melahirkan ide-idenya, dan/atau sebagai pembimbing, pendorong, fasilitator dan pelayan bagi peserta didik.

Pengembangan kurikulum PAI dilakukan oleh guru/dosen dengan melibatkan peserta didik, misalnya dalam penentuan tujuan dan pemilihan tema-tema pembelajaran PAI. Tidak ada kurikulum standar, yang ada hanyalah kurikulum minimal yang dalam implementasinya dikembangkan bersama peserta didik. Isi dan proses pembelajarannya selalu berubah sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik serta kontekstual, karena itu pendekatan humanistik dalam pengembangan kurikulum PAI lebih cocok diterapkan dalam rangka pendalaman dan penghayatan serta pengamalan nilai-nilai akidah dan akhlak Islam untuk menyadari akan fungsi dan tujuan hidupnya sebagai khalifah-Nya di bumi. Nilai-nilai akidah dan akhlak Islam dikembangkan melalui proses keterpaduan antara pengetahuan, perasaan atau penghayatan, dan tindakan, sehingga peserta didik memiliki karakter sebagai seorang Muslim dan mukmin yang saleh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Lickona (1991) dalam Muhaimin, bahwa untuk mendidik karakter dan nilai-nilai yang baik kepada peserta didik diperlukan pendekatan terpadu antara ketiga komponen sebagai berikut;

1. *Moral Knowing*, yang meliputi: (1) *moral awareness*; (2) *knowing moral values*; (3) *perspective-taking*; (4) *moral reasoning*; (5) *decision making*; (6) *self-knowledge*.
2. *Moral Feeling*, yang meliputi: (1) *conscience*; (2) *self-esteem*; (3) *empathy*; (4) *loving the good*; (5) *self-control*; (6) *humility*.
3. *Moral Action*, yang mencakup: (1) *competence*; (2) *will*; (3) *habit*.

Ketiga komponen yang terpadu tersebut perlu didukung oleh perhatian di luar kelas, penciptaan budaya moral yang positif di sekolah; dan sekolah, orang tua dan masyarakat juga berperan

sebagai orang tua yang bersedia membimbing, mengarahkan dan mengontrol keadaan akhlak/moral peserta didik. Dengan demikian, peserta didik akan memiliki kompetensi, kemauan yang kuat dan kebiasaan dalam menjalankan nilai-nilai moral yang baik.

Dalam kaitannya dengan penentuan strategi pembelajaran PAI, maka pendekatan humanistik lebih menekankan kepada *active learning* (pembelajaran aktif), yang memiliki semboyan sebagai berikut;

- *What I hear, I forget*, yakni apa yang saya dengar mudah saya lupakan, karena guru berbicara 100-200 kata per menit, sedangkan peserta didik mendengar 50-100 kata per menit, lama kelamaan semakin berkurang.
- *What I hear and see, I remember a little*, apa yang saya dengar dan lihat akan saya ingat sedikit atau sebentar, lama kelamaan lupa lagi.
- *What I hear, see, and ask question about or discuss with someone else, I begin to understand*, yakni apa yang saya dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang atau teman, lain, maka saya mulai mengerti.
- *What I hear, see, and discuss, and do, I acquire knowledge and skill*, yakni apa yang saya dengar, lihat, diskusikan dan laksanakan, maka saya memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
- *When I teach to another, I master*, yakni ketika saya bisa mengajari orang atau teman lain, berarti saya menguasai.

Dengan demikian, pembelajaran aktif setidaknya-tidaknya sampai kepada tingkat yang ketiga, dan diusahakan untuk sampai kepada tingkatan yang keempat dan kelima. Untuk mencapainya tersebut, maka kegiatan pembelajaran harus dilandasi oleh *prinsip-prinsip*: (1) berpusat pada peserta didik; (2) mengembangkan kreativitas peserta didik; (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; (4) mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai; dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang

beragam serta belajar melalui berbuat.

### 3. Pendekatan Teknologis

Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan bertolak dari *analisis kompetensi* yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Materi yang diajarkan, kriteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (*job analysis*) tersebut. Kurikulum berbasis kompetensi yang saat ini sedang digalakkan di sekolah/madrasah termasuk dalam kategori pendekatan teknologis.

Dalam pengembangan kurikulum pendidikan Islam, pendekatan tersebut dapat digunakan untuk materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menekankan pada *know how* atau cara menjalankan tugas-tugas tertentu. Misalnya cara menjalankan shalat, haji, puasa, zakat, mengkafani mayit, shalat jenazah, dan seterusnya.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dikatakan menggunakan pendekatan teknologis, bilamana ia menggunakan pendekatan sistem dalam menganalisis masalah belajar, merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan menilainya. Di samping itu, pendekatan teknologis ingin mengejar kemanfaatan tertentu, dan menuntut peserta didik agar mampu melaksanakan tugas-tugas tertentu, sehingga proses dan rencana produknya (hasilnya) diprogram sedemikian rupa, agar pencapaian hasil pembelajarannya (tujuan) dapat dievaluasi dan diukur dengan jelas dan terkontrol. Dari rancangan proses pembelajaran sampai mencapai hasil tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan memiliki daya tarik.

### 4. Pendekatan Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial di samping menekankan isi pembelajaran atau pendidikan juga sekaligus menekankan proses pendidikan dan pengalaman belajar. Pendekatan rekonstruksi sosial berasumsi bahwa manusia adalah sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, selalu hidup

bersama, berinteraksi dan bekerja sama. Melalui kehidupan bersama dan kerja sama itulah manusia dapat hidup, berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Tugas pendidikan terutama membantu agar peserta didik menjadi cakap dan selanjutnya mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya.

Isi pendidikan terdiri atas problem-problem aktual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat. Proses pendidikan atau pengalaman belajar peserta didik berbentuk kegiatan-kegiatan belajar kelompok yang mengutamakan kerja sama, baik antar peserta didik, peserta didik dengan guru/dosen, maupun antara peserta didik dan guru/dosen dengan sumber - sumber belajar yang lain. Karena itu, dalam menyusun kurikulum atau program pendidikan materi pendidikan Agama Islam bertolak dari problem yang dihadapi dalam masyarakat sebagai isi materi tersebut, sedangkan proses atau pengalaman belajar peserta didik adalah dengan cara memerankan ilmu-ilmu dan teknologi, serta bekerja secara kooperatif dan kolaboratif, berupaya mencari pemecahan terhadap problem tersebut menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Adapun kegiatan penilaian dilakukan untuk hasil maupun proses belajar. Guru/dosen melakukan kegiatan penilaian sepanjang kegiatan belajar (Muhaimin, 2012: 163-167).

### **Kesimpulan**

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Islam sinkronisasi terhadap kebijakan kerangka kualifikasi nasional Indonesia perlu memperhatikan prinsip relevansi, efektifitas, efisiensi, kesinambungan, dan fleksibilitas. Pada aspek kebijakan, landasan yuridisnya mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 73 tahun 2013 tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi, mengharuskan Perguruan Tinggi, Sekolah Tinggi, Institut maupun Universitas selambat-lambatnya tahun 2017 menerapkan

kurikulum mengacu KKNI yang secara tidak langsung kurikulum yang pada awalnya mengacu pada pencapaian kompetensi menjadi mengacu pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

Pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam merupakan suatu proses kegiatan peninjauan kembali, penyusunan, pelaksanaan, penilaian dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam baik dari KKNI dan MBKM. Contoh pengembangan kurikulum yang dilakukan secara mekanik dan organik melalui penekanan pada kejelasan profil lulusan beserta deskripsi operasionalnya, CPL sebagai indikator pencapaian profil lulusan, dan bidang kajian PAI sebagai ruang lingkup pengembangan mata kuliah.

Pada pengembangannya diperlukan empat pendekatan, yaitu: 1) pendekatan subjek akademis; 2) pendekatan humanistik; 3) pendekatan teknologis; dan 4) pendekatan rekonstruksi sosial. Dengan memperhatikan karakteristik materi Pendidikan Agama Islam, maka pengembangan kurikulum tersebut dapat menggunakan pendekatan eklektik, yakni dapat memilih yang terbaik dari keempat pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristiknya.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, H. M. (1998). *Pengembangan Kurikulum di Perguruan Tinggi*. Pustaka Setia. Al-
- Syaibani, O. M. A.-T. (1979). *Falsafah Pendidikan Islam*. Bulan Bintang.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. (1998). *Qualitative Research For Education an Introduction to Theori and Methods*. Allyn and Bacon.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Aproaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Daradjat, Z. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
- Dimiyati, & Mudjiono. (2002). *Belajar dan Pembelajaran*. Rineka Cipta.
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-Dikti, (2018).
- Fitri, A. Z. (2013). *Inovasi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI pada Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)*.
- George, A. B. (1968). *Curriculum Theory*. KAGG Press. Hamalik,
- O. (1999). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hanafi, H., Adu, L., & Zainuddin. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam* (1st ed., Vol. 1). DEEPUBLISH.
- Idi, A. (2010). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Ar-Ruzz Media.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publication.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Matthew B Miles, A Michael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication. 656
- Moleong, L. J. (2008). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

- Muhaimin. (2009). *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum, hingga Strategi Pembelajaran*. Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2014). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mujib, A., & Mudzakkir, J. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, S. (1993). *Pengembangan Kurikulum*. Citra Aditya Bakti.
- Prabawa, A. H., & Ariatmi, S. Z. (2002). *Paradigma Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2000*. Muhammadiyah University Press.
- Ramayulis. (1998). *Ilmu Pendidikan Islam*. Kalam Mulia.
- Sukmadinata, N. S. (2013). *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek*. Remaja Rosdakarya.
- Sutrisno, & Suyadi. (2016). *Desain Kurikulum Perguruan Tinggi Mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional*. PT Remaja Rosdakarya.